



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Lindung Saut Maruli Sirait**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **50315**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.745.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m²/220 m² di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m²/120 m² di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1157 m²/640 m² di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 3.330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m²/34 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 627.900.000**

1. MOBIL, Toyota minibus Tahun 2001, WARISAN Rp. 50.000.000
2. MOBIL, Toyota Minibus Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, Honda bebek/matic Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, Honda bebek/matic Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. LAINNYA, Polygon Sepeda Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
6. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	470.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.562.692.799
F. HARTA LAINNYA	Rp.	472.000.000
Sub Total	Rp.	9.877.592.799
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.877.592.799

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.